	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
	IDENTITAC DENEDINA DENOMACII					

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

Y								
	RIAN KEUANGAN RI AT JENDERAL PAJAK	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 2 4 1 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan						
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 561 3 722 000								
								
A.2 NIK								
A.3 Nama : EKO RIYANTO								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
4	21-402-01	14.990.000	14.990.000	0	15	2.248.500		
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyyy								
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
3.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
=								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Inst	tansi Pemerintah :	9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0				
C.2 Nama Inst	ansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	I TIMUR		
C.3 ID Subunit	Organisasi :]		
C.4 Tanggal	:	0 4 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Pena	andatangan :	RIANDY						
C.6 Pernyataa	ո Wajib Pajak ։	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya		
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara		

AYTKQEB4